

EVALUASI KEBIJAKAN PERAN POLRES BOJONEGORO DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERKELAHIAN KELOMPOK PERGURUAN SILAT MELALUI PEMBENTUKAN “BOJONEGORO KAMPUNG PESILAT”

Mochammad Khambali ¹⁾, Priyanto ²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Khambali471@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Polres Bojonegoro dalam mencegah terjadinya perkelahian kelompok perguruan silat melalui pembentukan Bojonegoro Kampung Pesilat dengan adanya program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perkelahian antar perguruan silat. Kebijakan program Bojonegoro Kampung Pesilat bertujuan agar para pesilat wilayah Bojonegoro dapat menjalin keharmonisan, dan menghapus tuntas isu-isu gesekan fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi dan menganalisis data: 1) bagaimana peran Polres Bojonegoro dalam menjalankan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” di Kabupaten Bojonegoro dan 2) bagaimana dampak keberadaan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” dalam memberikan wadah bagi kelompok perguruan silat di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi William N. Dunn. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah Bagaimana dampak keberadaan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” dalam memberikan wadah bagi kelompok perguruan silat di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan Bojonegoro Kampung Pesilat memberikan dampak yang cukup baik meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Program yang dilakukan oleh Bojonegoro Kampung Pesilat adalah dengan membuat program kerja bakti yang dilakukan oleh seluruh kelompok perguruan silat. Kemudian program lainnya adalah mengadakan kegiatan latihan bersama yang pada akhirnya dilanjutkan dengan acara pertandingan persahabatan. Keberadaan Bojonegoro Kampung Pesilat mampu mempersatukan seluruh kelompok perguruan silat dan menjadi wadah untuk menampung aspirasi serta menjadi tempat silaturahmi sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat Bojonegoro.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Organisasi Perguruan Silat

ABSTRACT

The policy of the Bojonegoro Police in preventing fights between martial arts groups through the formation of the Bojonegoro Pesilat Village with this program is motivated by the many cases of fights between silat schools. The policy of the Bojonegoro Kampung Pesilat program aims to ensure that martial artists in the Bojonegoro area can establish harmony and completely eliminate issues of physical friction. The aim of this research is to describe and analyze the data: 1) what is the role of the Bojonegoro Police in running the "Bojonegoro Kampung Pesilat" forum in Bojonegoro Regency and 2) what is the impact of the existence of the "Bojonegoro Kampung Pesilat" forum in providing a forum for silat college groups in Bojonegoro Regency. This research uses William N. Dunn's evaluation indicators. Then the second research focus is what is the impact of the existence of the "Bojonegoro Kampung Pesilat" forum in providing a forum for silat college groups in Bojonegoro Regency. The results of this research are that the existence of the Bojonegoro Pesilat Village has had a quite good impact, although there is still a lot that needs to be improved. The program carried out by Bojonegoro Kampung Pesilat is to create a community service program carried out by all silat college groups. Then another program is holding joint training activities which in the end is followed by a friendly match. The existence of the Bojonegoro Pesilat Village is able to unite all silat school groups and become a forum for accommodating aspirations and a place for friendship so as to provide comfort for the people of Bojonegoro.

Keyword: Policy Evaluation, Silat College Organization

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat yang berkembang di Indonesia ini adalah masyarakat yang bersifat multikultur, suatu masyarakat yang mempunyai keberanekaragaman suku, budaya, agama dan karakter dengan perspektifnya masing-masing. Pandangan atas suatu dialektika sosial tentunya sangat memungkinkan untuk dapat menyebabkan gesekan antar kepentingan dan pemahaman yang berbeda, dan konflik adalah menggambarkan bahwa manusia tidak lepas sosiabilitas, membutuhkan keberadaan orang lain, tetapi ia juga perlu beraktivitas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dilingkungan dimana ia tinggal.

Pertentangan diantara masyarakat sangat dimungkinkan pula untuk memberikan pengaruh kepada perubahan sosial dan kebudayaan Konflik horizontal antar kelompok masyarakat apabila dibiarkan dapat berpotensi menjadi semakin luas yang tidak menutup kemungkinan dapat mengancam stabilitas nasional akibat terganggunya persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Salah satu contoh konflik sosial secara horizontal yang terjadi di negeri ini ialah konflik antar perguruan silat di Jawa Timur.

Sejak dahulu kala, pencak silat dipandang hanya memiliki ajaran potensi pengembangan fisik. Perguruan silat ini secara tidak langsung mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, serta semangat kebersamaan, kerukunan dan gotong-royong senantiasa mewarnai potret lapangan. Dalam lingkup pedesaan, organisasi silat menjadi penanda karakter kaum muda. Globalisasi yang katanya zaman now, pemuda yang tidak gabung dalam organisasi rentan "dikucilkan". Seolah-olah terkena doktrin, semakin tinggi loyalitas terhadap silat, semakin banyak mata muda yang memandang.

Kasus perkelahian antar perguruan silat yang dimotori oleh Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Karesidenan Madiun akhir-akhir ini sangat marak dan melibatkan masa pendukung secara massif dan di sertai dengan pengerusakan serta jatuhnya korban jiwa. Hadirnya konflik tersebut juga menimbulkan keresahan dan ketidaknyaman berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya masa lalu tetapi hingga tahun 2011 ini tradisi itu masih terus berjalan.

Keadaan penegakan hukum disana dikota tersebut dapat dikatakan sangatlah lemah atau

tidak jarang hukum yang berlaku tidak dapat diaplikasikan disana sekali pun telah ada jatuh korban. Pihak Institusi kepolisian pun mengalami kesulitan di dalam pengusutannya atau bahkan tidak berani untuk melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghentikan pertikaian yang sudah menjadi sebuah tradisi itu. Semangat jiwa muda pemuda memang adalah merupakan puncak klimaks dimasa usia keremajaan. Generasi muda dalam masyarakat dan bangsa secara singkat mempunyai peranan yang sangat krusial yaitu terkait dengan pengembangan generasi muda, pengembangan wadah generasi muda, dan mempunyai kewajiban dalam bentuk mengeluarkan suatu kebijakan nasional atas suatu peran pemuda terhadap bangsa dan negara.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, terdapat kurang lebih 20 perguruan yang ada di Bojonegoro, Tampaknya, corak kehidupan pesilat turut menentukan posisi pandangan masyarakat terhadap setiap masing-masing aliran tersebut.

Guna mengatasi persoalan itu, Kapolres Bojonegoro, AKBP. Wahyu Sri Bintoro pada tahun 2018 mengusulkan agar dibentuk suatu wadah dengan nama "Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP)". Untuk menindaklanjuti program ini, kapolres Bojonegoro mengadakan apel besar untuk para pesilat guna deklarasi kampung pesilat di Bojonegoro dan juga ikrar kampung pesilat, yang dihadiri masing-masing anggota silat dari 20 perguruan. Turut hadir pula pada acara tersebut yakni Bupati Bojonegoro.

Namun seiring berjalanya waktu oknum-oknum dari perguruan pencak silat tersebut menyalah gunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyakiti orang yang tidak bersalah maupun digunakan sebagai ajang perkelahian antar kelompok perguruan. Berdasar dari latar belakang tersebut muncul inovasi yang digagas oleh Kapolres Bojonegoro untuk membentuk suatu wadah yang bisa digunakan untuk menampung setiap aspirasi guna memecahkan permasalahan yang ada di setiap perguruan sehingga tidak sampai mengakibatkan gesekan antar kelompok perguruan. Wadah tersebut diberi nama 'BKP (Bojonegoro Kampung Pesilat). Dalam hal penanganan konflik seperti yang dijelaskan di atas, tentu membutuhkan sebuah tindakan hukum yang tepat dan tegas dalam upaya penyelesaiannya.

Dalam hal penanganan konflik seperti yang dijelaskan di atas, tentu membutuhkan sebuah tindakan hukum yang tepat dan tegas dalam upaya

penyelesaiannya. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Kabupaten Bojonegoro tentu memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan konflik horizontal terkait. Hal ini sesuai dengan fungsi Kepolisian dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini di fokuskan kedalam evaluasi kebijakan peran polres bojonegoro dalam mencegah terjadinya perkelahian kelompok perguruan silat melalui pembentukan bojonegoro kampung pesilat. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi dan analisis tentang bagaimana peran Polres Bojonegoro dalam menjalankan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” di Kabupaten Bojonegoro kemudian untuk menyajikan deskripsi dan analisis tentang bagaimana dampak keberadaan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” dalam memberikan wadah bagi kelompok perguruan silat di Kabupaten Bojonegoro.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari

dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yakni kegiatan yang disiapkan untuk menilai sejauh mana manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang telah dilaksanakan. Kegiatan dalam evaluasi kebijakan mempunyai teknik dan cara pengukuran tertentu, yang mempunyai metode analisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Dari situlah tujuan evaluasi tersebut, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan.

Sedangkan menurut (Dunn, 2003) evaluasi merupakan sebuah tahapan kebijakan publik yang menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan yang ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif memecahkan permasalahan yang ada atau tidak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu. Dalam pemerintahan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran 36 akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan suatu program atau kebijakan.

3. Sejarah Konflik Kelompok Perguruan Silat di Bojonegoro

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Setiap daerah memiliki berbagai aliran bela diri pencak silat. Termasuk seni bela diri yang

terkenal di Bojonegoro yaitu Perguruan silat PSHT dan IKSPI Kera Sakti. Kedua perguruan silat yang berada di Desa Sumuragung, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro ini sering terlibat konflik sehingga menimbulkan kerugian dari segi materiil hingga menimbulkan korban jiwa.

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu perguruan besar Pencak Silat di Indonesia didirikan oleh Ki Hardjo Oetomo tahun 1922 yang masih berkembang pesat, baik dalam negeri maupun luar negeri (MUBES VI, 2000). Perguruan lain yang masih eksis mempertahankan nilai, tradisi, budaya serta kesakralan adalah IKSPI Kera Sakti (Yulianie, 2015). Kedua perguruan ini bertujuan untuk mendidik manusia berbudi luhur dan ikut serta untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Keberadaan berbagai perguruan silat sebagai kebudayaan yang perlu dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun. Pencak silat mengalami perkembangan waktu dibuktikan dari semaiKN banyaknya perguruan. Namun, banyaknya perguruan silat juga beriringan dengan timbulnya suatu masalah yaitu konflik antar perguruan. Berdasarkan data laporan Polres Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017, terdapat 13 kasus konflik kekerasan yang melibatkan anggota perguruan pencak silat (Laporan Polres, 2014-2017). Dari laporan Polres pada tanggal 29 Oktober 2017 menunjukkan bahwa terjadi penganiayaan yang melibatkan anggota pencak silat di Desa Sumuragung, Kec Baureno, Kab. Bojonegoro. Kejadian tersebut dilakukan oleh pemuda yang menggunakan atribut perguruan PSHT terhadap pemuda yang menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti.

Kasus pengeroyokan juga dilakukan oleh sekitar 100 orang beratribut PSHT dan menggunakan cadar. Korban dari pengeroyokan tersebut berjumlah lima orang dan mengalami kerusakan pada kendaraan dan salah seorang rumah. Telah dilaksanakan penilisikan dari Satgas gabungan dan telah ditetapkan sembilan orang anggota PSHT sebagai tersangka (Laporan Polres, 2016). Resolusi konflik sudah dilaksanakan sebagai upaya meredam konflik antar anggota pencak silat yaitu dengan deklarasi ikrar damai dan diresmikan Bojonegoro Kampung Pesilat oleh Pemkab Bojonegoro pada tanggal 20 agustus 2016 (Lapharsus, 2016).

4. Tujuan Dibentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat

Maksud dan tujuan pembentukan dari Bojonegoro Kampung Pesilat adalah Membuat wadah untuk menyatukan aspirasi dari setiap perguruan sehingga setiap permasalahan dapat di pecahkan tanpa harus melalui perkelahian, untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dengan terjalinya sinergi antara polri dan pihak perguruan silat, Sebagai wadah untuk memberikan informasi yang berkembang kepada anggota perguruan melalui wadah BKP.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6). Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai bagaimana keberadaan kampung pesilat yang ada di Bojonegoro. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan di lapangan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010).

Pada penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah Bagaimana peran Polres Bojonegoro dalam menjalankan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian focus penelitian yang kedua adalah Bagaimana dampak keberadaan wadah “Bojonegoro Kampung Pesilat” dalam memberikan wadah bagi kelompok perguruan silat di Kabupaten Bojonegoro. Kedua focus ini akan diteliti menggunakan model kebijakan William N. Dunn.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Polres Bojonegoro. Alasan peneliti meneliti disini karena di Polres Bojonegoro menerapkan wadah bojonegoro kampung pesilat. Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama kurang lebih 2 Bulan.

4. Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:152) subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek Penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Kapolres Bojonegoro, dan Beberapa kelompok perguruan silat yang tergabung dalam wadah Bojonegoro Kampung Pesilat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai salah satu bagian penelitian, merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk membantu peneliti dalam penelitiannya. Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Berikut ini beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeleong, 2006: 186). Dengan melakukan wawancara, peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Observasi

Teknik pengamatan memungkinkan

peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moeleong, 2006). Sama halnya dengan wawancara, dalam teknik observasi seorang peneliti juga perlu membuat pedoman tentang aspek apa saja yang akan diamati saat penelitian berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto penelitian yang diambil saat pengambilan data berlangsung. Foto-foto tersebut berisikan aktivitas peneliti maupun informan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Aktivitas yang dimaksud terutama mengenai interaksi yang dilakukan pihak kepolisian Polres Bojonegoro dengan para Komunitas Perguruan Silat Kabupaten Bojonegoro.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Konflik antar pesilat yang terjadi di Bojonegoro lebih banyak melibatkan perguruan silat, walaupun di Kabupaten Bojonegoro terdapat sekitar 20 perguruan silat. Perguruan silat tersebut mempunyai anggota (pesilat) dalam jumlah besar dan berimbang serta tersebar di daerah Bojonegoro dan wilayah disekitar Bojonegoro. Saat ada acara pengesahan warga SH Terate tanggal 1 Suro dan acara Suran Agung SH Winongo Tunas Muda tanggal 10 Suro bahkan bisa dihadiri oleh lebih dari sepuluh ribu pesilat yang datang dari daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Konflik antar pesilat tersebut mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1990 an, dan mulai saat itu konflik mulai mereda karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Bojonegoro maupun oleh aparat keamanan setempat.

peneliti juga melihat bahwa konflik antar pesilat di Bojonegoro ini bukanlah konflik terbuka karena skala konflik dan efeknya tidak masif. Konflik ini lebih mempunyai ciri yang sama dengan konflik permukaan karena terjadinya kesalahpahaman antar pesilat kedua kubu yang bisa diatasi melalui komunikasi yang lebih baik sehingga dapat menghilangkan rasa saling curiga dan kesalahpahaman.

Namun peneliti melihat bahwa konflik antar pesilat di Bojonegoro belum mencapai tahap krisis yaitu karena konflik dan kekerasan yang terjadi masih berupa pemukulan, perkelahian, pengeroyokan, penghadangan dll. Walaupun

kadang konflik dilakukan oleh sekelompok pesilat namun tidak dalam jumlah masif dan korban dari kedua belah pihak juga tidak dalam jumlah massal.

Deutsch, (2016) mengatakan bahwa hampir semua konflik pasti berkaitan dengan kekuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik sering dipakai sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan atau ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan antar manusia, konflik juga digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Peneliti melihat bahwa pemangku kepentingan yang ada di Bojonegoro mulai dari aparat keamanan, pemda, dan pihak perguruan juga telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan usaha untuk menghentikan konflik antar pesilat untuk mengakhiri kekerasan dan membatasi perluasan dan eskalasi konflik melalui penegakan hukum aparat keamanan terhadap pelaku kekerasan serta melakukan pembatasan terhadap para pesilat yang masuk ke kabupaten Bojonegoro agar jumlah pesilat yang terkumpul di satu titik tidak terlalu banyak pada saat yang bersamaan.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Peneliti menilai bahwa pemangku kepentingan yang ada di Bojonegoro mulai dari aparat keamanan, pemda, dan pihak perguruan juga telah melakukan berbagai upaya, kegiatan dan usaha untuk melakukan Pemulihan Pasca konflik antar pesilat dengan mengadakan festival pencak silat bidang seni untuk mempertemukan para pesilat di Bojonegoro dan melatih kedewasaan mereka agar dapat beraktifitas bersama tanpa terjadi konflik, pembuatan spanduk ucapan selamat kepada perguruan silat lain yang melakukan kegiatan dan pembentukan paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat untuk menyelesaikan perselisihan dan terjadinya kesalahpahaman antar pesilat. Ubbe (2011) menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan khasanah tradisi intelektual termasuk dalam upaya membangun perdamaian dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya. Masing-masing daerah memiliki local wisdom yang perlu dihargai sebagai pilihan alternative penyelesaian konflik.

Masyarakat Bojonegoro masih menjunjung nilai-nilai lokal yang mempertahankan kerukunan masyarakat yang meliputi:

- 1) Masyarakatnya biasanya tidak menyukai konflik yang berlarut larut dan memakan energy dan biaya besar, mereka cenderung segera menyelesaikan konflik/ sengketa agar tidak berkepanjangan dan diketahui oleh banyak orang, karena dianggap sebagai perilaku ora patut atau tindakan yang tak pantas.
- 2) Masyarakatnya lebih mengedepankan sikap mengalah (nrimo ingpandum, nedo nrimo, legowo),
- 3) Masyarakatnya masih menonjolkan pola hidup harmoni, saling tolong menolong dan gotong royong.

Keberadaan local value ini, sampai saat ini masih cukup kokoh sebagai sumber mekanis penyelesaian sengketa. Berdasarkan data di atas peneliti melihat bahwa masyarakat Bojonegoro masih menonjolkan pola hidup harmoni, saling tolong menolong dan gotong royong. Mereka masih menginginkan hidup yang harmoni, hanya rasa saling tolong menolong itu harus diarahkan bukan hanya kepada sesama pesilat dari satu perguruan saja melainkan juga kepada pihak lain diluar komunitasnya.

Kegiatan bersama dalam bentuk gotong royong saat kerja bakti bersama para pesilat telah terbukti berhasil dilaksanakan oleh Pemda beserta aparat keamanan setempat dapat meredakan dan mengurangi potensi konflik. Namun peneliti juga tidak melihat masyarakat Bojonegoro tidak menyukai konflik yang berlarut-larut yang memakan energi, karena konflik antar pesilat ini telah berlangsung lama. Memang konflik sudah menurun intensitasnya sekarang, namun bukan berarti karena mereka malu konflik berkepanjangan akan diketahui oleh banyak orang. Ego pribadi dan identitas perguruan lebih menonjol dibandingkan rasa malu yang dimiliki oleh masyarakat jawa pada umumnya.

Data kasus yang melibatkan pesilat di wilayah Polres Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa masih terjadi aksi pengeroyokan, penganiayaan dan perusakan yang melibatkan sekelompok massa yang diduga dari kelompok SH Terate dan SH Winongo yang saling menyerang dengan cara saling melempar batu, melakukan pemukulan, pencegahan terhadap pesilat perguruan lain, dan merusak spanduk perguruan lain. Konflik tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dan sejumlah orang yang terluka dari warga masyarakat maupun dari kedua kelompok yang bertikai. Sehingga bisa disimpulkan peneliti

bahwa konflik antar kelompok masyarakat yang bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan social budaya masih terjadi di wilayah Bojonegoro.

Identitas Sosial Peneliti melihat bahwa hal ini mengindikasikan telah terjadi kategorisasi dalam masyarakat Madiun dimana tempat tinggal masyarakat Bojonegoro terbagi dalam kelompok masyarakat sesuai dengan perguruan pencak silat yang diikutinya. Mereka rela mendirikan tugu tanpa ijin dan tanpa bantuan dari perguruan silat demi menunjukkan identitas perguruan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Afif (2014) menyatakan bahwa sebuah identitas hadir karena manusia butuh untuk mengkategorisasikan sesuatu.

Berdasarkan data yang berhasil didapatkan selama penelitian dan teori tersebut diatas maka peneliti melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas di wilayah Bojonegoro yang ditandai dengan adanya symbol berupa tugu lambang perguruan silat tertentu. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan identitas dalam bentuk symbol berupa tugu yang harus dipertahankan keberadaannya oleh warga sekitar. Upaya untuk menekan potensi konflik karena perbedaan identitas dengan cara menghilangkan simbol perguruan berupa tugu harus melakukan kajian secara mendalam. Kecintaan masyarakat Bojonegoro akan budaya daerah setempat dalam bentuk seni pencak silat telah berlangsung lama dan mereka presentasikan kecintaan tersebut dalam bentuk Tugu.

Beberapa konflik yang terjadi juga menunjukkan bahwa masih ada resistensi (penolakan) warga Bojonegoro apabila ada pihak yang berusaha menghilangkan identitas tersebut dengan cara merusak simbol identitas kelompoknya (tugu) sehingga mereka berusaha membela keberadaan tugu tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya kategorisasi dalam masyarakat Bojonegoro yang membagi masyarakat dalam kelompok yang sama.

Disini peneliti melihat bahwa para pesilat yang ada di Bojonegoro mempunyai pemahaman nilai-nilai yang ada di perguruan sehingga mengembangkan rasa peduli kepada rekan sesama pesilat dan hal ini menimbulkan kebanggaan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk pendirian tugu.

Peran Polres Bojonegoro Peran Polres Bojonegoro dalam Pencegahan Konflik dengan melakukan kegiatan fasilitasi, komunikasi dan

koordinasi dalam bentuk sarasehan dengan ormas yang ada di Bojonegoro termasuk para pesilat di kantor Polres Bojonegoro. Melalui kegiatan ini Polres Bojonegoro menyampaikan program kegiatan dan evaluasi dan memdengarkan aspirasi dari ormas termasuk perguruan silat di Bojonegoro. Bagi pihak ormas dan perguruan silat dapat bertatap muka secara langsung dan berkomunikasi dua arah dengan Polres Bojonegoro sehingga tercipta dialog yang baik agar tercipta kondisi yang nyaman dan damai.

Selain itu juga diadakan kegiatan pembinaan terhadap perguruan silat yang ada di Bojonegoro dengan menghadiri acara pengukuhan pengurus persaudaraan Setia Hati Terate yang dilakukan oleh oleh Muspika setempat agar tercipta komunikasi dan hubungan yang baik. (Kesbangpol Kota Madiun, 2015) Selain itu juga diadakan kegiatan sarasehan dan pembinaan terhadap perguruan silat dibawah IPSI Bojonegoro yang dihadiri unsur Polres Bojonegoro dan unsur Kodim dan perwakilan perguruan silat di Bojonegoro. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan peran aktif anggota perguruan silat di bidang Kamtibmas dan menumbuhkan rasa nasionalisme anggota perguruan silat di Bojonegoro guna menangkal dampak negatif budaya asing. (Kesbangpol Kota Madiun, 2016).

Menurut teori peran dalam melihat hubungan antar manusia, bahwa dalam pergaulan sosial sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Teori ini menyatakan bahwa jika seseorang mematuhi skenario maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara". Sesuai teori ini maka dalam hal ini Polres Bojonegoro harus melakukan perannya dengan baik dalam membina para pesilat yang ada di wilayahnya agar tercipta kerukunan dan keamanan di Bojonegoro dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada baik dari aparat keamanan, para pemimpin perguruan, IPSI, termasuk para pesilat itu sendiri.

Peneliti juga melihat bahwa Polres Bojonegoro sudah berusaha untuk perannya dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi pasca konflik melalui perundingansecaradamai, dengan cara memfasilitasi adanya paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat sebagai forum komunikasi apabila terjadi konflik antar pesilat di Madiun maka para pihak dapat duduk bersama untuk

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Melalui paguyuban Bojonegoro Kampung Pesilat itulah akan dibahas bagaimana pokok permasalahannya dan apabila ada pihak yang salah paham diharapkan mengakui bersalah dan pihak korban juga diharapkan memaafkan, bahkan kadang juga dilaksanakan ganti rugi biaya berobat kepada korban. Selain itu Polres Bojonegoro juga menyadari bahwa salah satu penyebab konflik adalah karena terjadinya pengangguran di kalangan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Polres Bojonegoro untuk mencegah terjadinya konflik dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang berpotensi untuk membuat kerusuhan dengan memberikan lapangan pekerjaan sektor non formal seperti tukang parkir. (komunikasi personal, 16 Februari 2017).

Konflik antar pesilat di Bojonegoro harus ditangani secara terus menerus dan menyeluruh serta menyentuh pada akar permasalahannya. Pemerintah tidak mungkin melarang aktivitas dan budaya pencak silat yang ada di Bojonegoro. Namun sumber permasalahan yang dapat memicu timbulnya kekerasan harus dikenali agar dapat minimalisir efeknya. Konflik akan terus terjadi apabila tidak ada komunikasi yang harmonis dan terbuka antar kelompok masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini sesuai dengan Soekanto, (2015) yang menyatakan bahwa antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, dan keduanya saling tergantung. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran karena keduanya mempunyai arti.

Polres Bojonegoro melakukan perannya dalam penanganan konflik antar pesilat di Bojonegoro karena kedudukannya selaku pemerintah daerah. Menurut teori ini masyarakat yang diberi pemahaman tentang peran-peran secara otomatisakan lebih paham dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah satu faktor utama dalam mencapai kepuasan bagi individu untuk menjalankan sebuah fungsi. Dalam hal ini Polres Bojonegoro telah memberikan pemahaman kepada para pihak baik pimpinan perguruan agar turut berperan dalam penanganan konflik antar pesilat.

Polres Bojonegoro memandang perlu untuk memberikan pengetahuan, wawasan berupa pembinaan tentang penguatan kelembagaan bagi ormas termasuk perguruan silat di Bojonegoro

agar dapat mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang selama ini tergerus oleh pengaruh dari dalam dan luar negeri serta pengaruh paham radikal. Kegiatan tersebut berupa pemberian ceramah wawasan kebangsaan dengan mengundang ormas yang ada di Bojonegoro yang dihadiri oleh Walikota, Unsur Polres Bojonegoro, Unsur Kodim. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melihat bahwa Polres Bojonegoro sudah berusaha untuk melakukan kegiatan rekonstruksi pasca konflik dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian.

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia, dalam pergaulan sosial sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak yang mempunyai tujuan yang sama misalnya berlatih pencak silat maka disebut sebagai perguruan pencak silat, komunitas tersebut kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua Umum Perguruan silat beserta jajaran pengurusnya, yang berperan mengatur, melatih dan membimbing para pesilat yang ada di bawahnya.

Terkait dengan data-data tersebut diatas maka peneliti dapat menyatakan bahwa yang terjadi di Bojonegoro sesuai teori diatas dimana warga masyarakatnya banyak yang tertarik bergabung menjadi anggota perguruan silat karena factor budaya sejak jaman dahulu. Pada saat ini di Bojonegoro terdapat 20 perguruan silat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peneliti melihat perkembangan perguruan silat Bojonegoro bahkan sampai di beberapa negara sahabat seperti Belanda, Timor Reste, Malaysia.

Bojonegoro Kampung Pesilat

Kapolres Bojonegoro, AKBP. Wahyu Sri Bintoro pada tahun 2018 mengusulkan agar dibentuk suatu wadah dengan nama "Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP)". Untuk menindaklanjuti program ini, kapolres Bojonegoro mengadakan apel besar untuk para pesilat guna deklarasi kampung pesilat di Bojonegoro dan juga ikrar kampung pesilat, yang dihadiri masing-masing anggota silat dari 20 perguruan. Turut hadir pula pada acara tersebut Bupati Bojonegoro. Dalam sambutannya, beliau Suyoto menjelaskan bahwa dalam sejarah Bojonegoro adalah tempatnya konflik. . Setidaknya, melalui program ini para

pesilat wilayah Bojonegoro dapat menjalin keharmonisan, menghapus tuntas isu-isu gesekan fisik dengan tujuan akhir sebagai pelakumitra kamtibmas Kota Bojonegoro.

Didepan para tamu undangan dan para peserta upacara, para pesilat yang mewakili perguruan masing - masing tampil bersama berbaur dengan perguruan lain untuk memperagakan jurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) secara bersama dan serempak dengan iringan musik gamelan Jawa. Setelah memperagakan jurus dihadapan para tamu undangan dan peserta upacara, para pesilat ini berikrar untuk bersama sama menciptakan kerukunan antar individu dan antar perguruan. Adapun isi Ikrar tersebut adalah :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 3) Meningkatkan persatuan dan kesatuan Bangsa;
- 4) Menjaga dan menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- 5) Menjalin persaudaraan dan kerukunan antar perguruan pencak silat dan diluar perguruan pencak silat.

Di dalam Wilayah hukum Polres Bojonegoro sendiri terdapat 20 (dua puluh) perguruan pencak silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia (IPSI) Kab.Bojonegoro yaitu :

- 1) PSH TERATE
- 2) PSH WINONGO TUNAS MUDA,
- 3) PANGASTUTI,
- 4) PBD RAJEKWESI,
- 5) BUDI SUCI
- 6) SEDULUR SEJATI SYAILENDRA,
- 7) MARGOLUYU 151,
- 8) PERSINAS ASAD,
- 9) PNSN PUSPA NURANI,
- 10) PSNU PAGAR NUSA,
- 11) TAPAK SUCI,
- 12) IKSPI KERA SAKTI,
- 13) PENCAK ORGANISASI,
- 14) BETAKO MERPATI PUTIH,
- 15) GUBUK REMAJA,
- 16) CEMPAKA PUTIH,
- 17) RASA,
- 18) PERISAI DIRI,
- 19) MACAN TELAGA MERAH,
- 20) BUNGA ISLAM

Namun seiring berjalanya waktu oknum-oknum dari perguruan pencak silat tersebut

menyalah gunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyakiti orang yang tidak bersalah maupun di gunakan sebagai ajang perkelahian antar kelompok perguruan permasalahan itu bisa di picu dari perilaku yang kurang terpuji yang di miliki oleh oknum anggota pencak silat tersebut ,tawuran atau ajang perkelahian yang dilakukan oleh oknum anggota perguruan pencak silat tersebut rata2 dilakukan oleh anggota yang masih muda yang secara emosional masih labil belum bisa mengontrol sifat hawa nafsu dan sifat kesombongannya sehingga dari kejadian gesekan ataupun ajang perkelahian timbullah korban yang mengalami luka berat maupun sampai meninggal dunia.

Maksud dan tujuan pembentukan dari Bojonegoro Kampung Pesilat adalah : 1. Membuat wadah untuk menyatukan aspirasi dari setiap perguruan sehingga setiap permasalahan dapat di pecahkan tanpa harus melalui perkelahian 2. untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dengan terjalinya sinergi antara Polri dan pihak perguruan silat 3. Sebagai wadah untuk memberikan informasi yang berkembang kepada anggota perguruan melalui wadah BKP

Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan yang dilakukan :

- 1) Ngopi Bareng Antar Ketua Perguruan Silat Salah satu upaya untuk mempererat hubungan antar perguruan silat ini, Polres Bojonegoro mengadakan agenda rutin yaitu mengajak seluruh ketua perguruan silat se Bojonegoro untuk ngopi bareng sambil diskusi membahas beberapa poin yang menekankan pada peningkatan persatuan perguruan silat yang ada di Bojonegoro.
- 2) Kerja Bhakti Oleh Anggota Perguruan Silat Yang Tergabung BKP Di MasingMasing Kecamatan Setiap Bulanya Agenda berikutnya adalah dengan mengadakan kerja bakti bersama yang melibatkan seluruh elemen perguruan silat se Bojonegoro dengan membersihkan tempat-tempat umum yang tersebar di beberapa titik di Bojonegoro. Kegiatan ini akan menjadi program bersama guna menciptakan kerukunan antar perguruan silat.
- 3) Tanding Persahabatan Antar Perguruan Agenda lainnya yang tidak kalah menarik yang digagas oleh Bojonegoro Kampung Pesilat adalah dengan mengadakan tanding persahabatan antar perguruan silat. Kegiatan ini yang membuat para perguruan silat semakin

bersatu karena akan menciptakan persaingan yang sehat dan akan berdampak pada peningkatan kemampuan individu maupun masing-masing kelompok.

- 4) Latihan Bersama Antar Perguruan Silat Selain tanding persahabatan, agenda lainnya yaitu mengadakan latihan bersama antar perguruan silat se Bojonegoro. Pada program ini akan diikuti oleh seluruh perguruan silat yang ada di Bojonegoro dengan memberikan beberapa teknik latihan dan pemberian motivasi maupun masukan kepada anggota perguruan silat. Ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjalin komunikasi koordinasi dan kebersamaan di lingkungan perguruan silat.

Strategi Polres Bojonegoro dalam manajemen konflik pencak silat di Kabupaten Bojonegoro Pada dasarnya, tindakan kepolisian terbagi menjadi tiga (3) yaitu pre-emptif, preventif, dan represif (Sendewana 2013; Astari 2016). Tindakan pre-emptif adalah pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan dibidang edukatif seperti pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi dengan tujuan agar suatu tindakan pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Sedangkan tindakan represif adalah tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, yang merupakan langkah terakhir setelah pre-emptif dan preventif seperti operasi rutin dan operasi gabungan. Dalam kaitannya dengan manajemen konflik Pencak Silat di Kabupaten Bojonegoro, tahapan strategi Polres Bojonegoro dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahapan pre-emptif Tindakan pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya konflik terjadi, sehingga lebih tepatnya disebut kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan masyarakat. Meskipun telah banyak kasus konflik yang berupa penganiayaan, pengancaman yang muncul, namun ini tetap harus dilakukan untuk mencegah kasus demikian menjadi semakin meluas dan tidak terkendali. Sehingga perlu bimbingan melalui tokoh-tokoh organisasi atau masyarakat dari kedua organisasi tersebut.

Tahapan Preventif Polres Bojonegoro melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana di wilayah hukum Polres Bojonegoro dengan menempatkan personil Kepolisian di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang rawan terjadinya konflik, daerah yang rentan

menjadi tempat-tempat konflik organisasi terus dipantau dan diawasi melalui giat patroli tersebut, dengan demikian maka Polres Bojonegoro melakukan kegiatan antisipasi (tindakan preventif) melalui pengembangan patroli- patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan dengan membuat pos-pos penjagaan, membentuk patroli roda dua serta melakukan pengawasan- pengawasan terhadap pos-pos yang dekat dengan wilayah organisasi ini maka diharapkan dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya konflik kedua belah pihak. Secara teori, untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, seyogianya tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan (Gilling 1997; Schneider 2014; Purnomo 2019; Mustolish 2019). Hal yang perlu dicoba adalah dengan membongkar konsep dari pencegahan (prevention) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention).

Tahapan represif Tahap ketiga, setelah pre-emptif dan preventif adalah penegakkan hukum (Gakkum) dimana menjalankan fungsi represif. Beberapa upaya represif Polres Bojonegoro dalam menanggulangi konflik yaitu: (1) Koordinasi dengan jajaran polsek di hukum wilayah administratif. Koordinasi dapat dilakukan dengan cara melakukan hubungan kerjasama yang erat dengan polsek di bawah Polres Bojonegoro. Oleh karena itu, dengan kerjasama antar polsek dengan meningkatkan kewaspadaan di tiap-tiap wilayah akan membantu mengurangi tingkat kejahatan akibat konflik organisasi bela diri di wilayah hukum Polres Bojonegoro; (2) Analisis data residivis, salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pengeroyokan dan kembali melakukan pengeroyokan dengan pengancaman senjata tajam.

Peraturan substansial yang ada dalam Undang-Undang Pemasarakatan ini di jadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemsarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sitem pemsarakatan di Indonesia, maka undang-undang pemsarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak. Pada umumnya, tindakan represif lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah

terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas. Hal ini juga dilakukan oleh Polres Bojonegoro berperan dalam hal ini melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) terhadap kasus pengeroyokan, pengancaman dengan senjata tajam, dan perusakan barang atau benda milik orang lain. Peraturan substansial yang ada dalam Undang-Undang Pemasaryakatan ini di jadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemsaryakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sitem pemsaryakatan di Indonesia, maka undang-undang pemsaryakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak. Pada umumnya, tindakan represif lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas. Hal ini juga dilakukan oleh Polres Bojonegoro berperan dalam hal ini melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) terhadap kasus pengeroyokan, pengancaman dengan senjata tajam, dan perusakan barang atau benda milik orang lain.

Faktor Yang Mempengaruhi Kendala-Kendala yang Dihadapi Polres Bojonegoro

Dalam manajemen konflik pencak Silat, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk menanggulangi konflik di Kabupaten Bojonegoro, adapun kendala tersebut yaitu:

Kendala internal yang dialami yakni:

- a. Biaya Operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang di keluarkan untuk proses penyidikan cukup besar. Sekali dalam melakukan proses dari tahapan preemtif, preventif hingga reprsif biaya yang dibutuhkan cukup besar.
- b. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan konflik tersebut. Terlihat dengan jelas hubungan antara anggota satuan fungsi lainnya dan Reskrim kurang maksimal, belum nampak kegiatan berjalan secara efektif dalam penanganan Tindak Pidana, hubungan Satuan Reskrim dengan masyarakat terutama terkait dengan perkara pidana masih belum maksimal,

hal ini dapat dilihat dari keluhan–keluhan masyarakat terhadap pelayanan Penyidikan kasus pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan tersebut;

- c. Quick Respon, lambatnya pihak kepolisian ditingkat Polsek mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan kasus pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati.

Kendala eksternal yang dialami yakni:

- a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati yang dilihat langsung di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian setempat, sehingga secara otomatis menghambat penanganan kekerasan atau konflik antara kedua organisasi tersebut. Hal ini karena masyarakat enggan terlibat oleh masalah organisasi PSHT maupun PSHW;
- b. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan;
- c. Setiap tahun jumlah anggota dari kalangan anak remaja meningkat. Padahal remaja masih sangat labil, sehingga mudah terpancing emosi. Perlu pembinaan yang kuat oleh Polres Bojonegoro, karena masih labil tersebut.

Analisa Penelitian Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali dan mencari fakta yang terjadi dilapangan. Ada 6 variabel untuk kebijakan dapat dievaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan.

Efektivitas

Efektivitas pada evaluasi ini yakni pencapaian hasil dari program kebijakan melalui aplikasi yang dapat dilihat dari kesesuaian hasil, ketepatan waktu dengan apa yang menjadi tujuan. Peneliti memberi pendapat agar program kebijakan melalui aplikasi pada polres lamongan dapat mendapatkan dan mencapai hasil yang efektif, maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pembentukan Bojonegoro Kampung Pesilat: 1) Terciptanya kebijakan yang transparansi dan singkat serta

segala bentuk pelayanan tidak berbelit-belit. Selesai dengan tepat waktu. 2) Adanya pemahaman masyarakat dan pihak dari pelaksana program kebijakan secara komprehensif yakni dari segi perencanaan, penyusunan, ataupun pelaksanaannya, biaya yang dikeluarkan sudah transparan.

Efisiensi

Menurut William N Dunn (2003: 430) yang mengungkapkan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk dapat menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yakni hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan dengan perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil pelaksanaan program kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat. Peneliti memiliki pendapat bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka harus didukung dengan fasilitas yang memadai dengan efektivitas dan mengukur apakah ada yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian mengenai program kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat yang dilihat dalam poin kecukupan bahwa adanya kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat dibutuhkan masyarakat.

Perataan

Pemerataan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Keadilan diberikan dari suatu kebijakan pemerintah kepada masyarakat, dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan yang sedang dijalankan, dengan hal itu dapat dilihat dari beberapa temuan data dilapangan sehingga dapat mengetahui apakah Bojonegoro Kampung Pesilat dapat dijangkau seluruh elemen Perguruan Silat Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat sudah dilakukan merata dan cukup adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa pengguna aplikasi juga mengatakan bahwa mendapatkan banyak manfaat dan menguntungkan.

Responsivitas

dalam kebijakan publik mempunyai arti sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas

penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Maka dari itu respon dari masyarakat dapat dikatakan sangat penting bagi sebuah kebijakan publik atau program yang sedang berlangsung. Responsivitas mengacu pada suatu disiplin ilmu dengan itu keberhasilan dari teori kebijakan dan keinginan masyarakat sangat dibutuhkan. Responsivitas ini dapat dilihat dari hasil kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat dapat memuaskan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Ketetapan

Ketetapan adalah kriteria yang dipakai untuk mengetahui sejumlah alternatif dijadikan rekomendasi dengan cara menilai apakah hasil dari alternatif yang telah direkomendasikan merupakan pilihan dan tujuan yang sudah layak. Dalam ketetapan merupakan proses keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat dari tujuan apakah sudah benar-benar tercapai, berguna dan berlaini bagi kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut dan apakah Bojonegoro Kampung Pesilat menjadi pilihan terbaik bagi kelompok masyarakat sasaran.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat jelas diajarkan dalam menjaga dan menumbuhkan persaudaraan (ukhwah wathaniyah). Upaya yang dilakukan yaitu pembinaan karakter tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam kepada pemuda terhadap tanggung jawab dirinya sendiri, orang tua, guru dan orang lain. Bukti dari pembinaan tanggung jawab sendiri yaitu, organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tidak memberi dispensasi terhadap siswa jika rasa tanggung jawab itu dilalaikan maka organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) akan mengeluarkan siswa tersebut. Peranan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mewujudkan situasi yang kondusif dengan menumbuhkan sikap toleransi yang secara aktif ikut terlibat untuk saling mengulurkan tangan dalam menciptakan perdamaian. Dengan demikian didikan yang ada dalam organisasi Bojonegoro Kampung

Pesilat (BKP) dapat dibuktikan melalui hasil dari ajaran sikap toleransi.

Bentuk kegiatan yang dilakukan : 1. Ngopi bareng antar ketua perguruan silat 2. Keja bhakti oleh anggota perguruan silat yang tergabung BKP di masing-masing kecamatan setiap bulanya 3. Tanding persahabatan antar perguruan 4. latihan bersama antar perguruan silat. Tahapan strategi Polres Bojonegoro dalam manajemen konflik Pencak Silat di Kabupaten Bojonegoro yaitu tahapan preemtif dengan cara pembinaan dan penyuluhan dengan tokoh masyarakat dalam organisasi. Tahapan preventif dilakukan dengan pelaksanaan patroli (operasi rutin), pengawasan serta operasi gabungan. Tahapan represif terkait fungsi penegakkan hukum melalui pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, yaitu dengan cara koordinasi dengan jajaran polsek di hukum wilayah administratif dan analisis data residivis. Kendala internal dalam manajemen konflik Pencak Silat PSHT dan PSHW di Kabupaten Bojonegoro antara lain Biaya Operasional yang tersedia kurang memadai, Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. serta lambatnya pihak kepolisian ditingkat Polsek mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan kasus pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan, serta kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan.

2. Rekomendasi

Peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan masukan agar pelaksanaan kebijakan Bojonegoro Kampung Pesilat semakin berkembang dan mengurangi gesekan atau konflik antar perguruan silat Bojonegoro 1. Peneliti berharap bahwa Polres Bojonegoro mampu untuk ssemakin mempererat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perguruan silat di Bojonegoro agar mencegah terjadinya potensi

konflik yang muncul antara perguruan silat 2. Peneliti berharap bahwa keberadaan Bojonegoro Kampung Pesilat mampu menjadi wadah yang besar dan menjadi percontohan untuk daerah lain di Jawa Timur 3. Peneliti berharap bahwa program-program yang disusun melalui Bojonegoro Kampung Pesilat untuk terus dikembangkan dan dijalankan secara konsisten agar menjadi wadah silaturahmi dan pertemuan rutin antar perguruan silat sehingga meminimalisir terjadinya konflik.

REFERENSI

- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Erni Yuninda (2020). Metode Evaluasi Kebijakan. Teori, Analisis dan Evaluasi Kebijakan. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801_097_file%205.pdf
- Hafni, R., Sinulingga, N. S. B., & Hasibuan, L. S. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung tunai dana desa pada ketahanan pangan di era pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 103–111.
- Handayani, F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Sipolima Pada Dinas Kominfo Kota Baubau Dalam Meningkatkan Kinerja Asn Ditengah Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 12, 12.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Mutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Issue April).
- Roni Pangeran. 2020. Metode Evaluasi Kebijakan.

- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
<https://fisip.umsu.ac.id/2023/06/06/metode-evaluasi-kebijakanpublik-pendekatan-dan-tantangan/> Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press.
- Subarsono, A. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara